

### KASUS PAJAK 3

#### SOAL 1

Chandra merupakan pegawai tetap di PT Bumi Sentosa, serta memiliki usaha berupa toko barang elektronik yang dirintisnya sejak bulan Juli 2010. Chandra telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2013.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Chandra telah menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2016 serta telah membayarkan pajak kurang bayarnya sebelum penyampaian SPT. Namun, setelah menyampaikan SPT, Chandra baru menyadari bahwa terdapat kesalahan dalam penghitungan pajaknya karena terdapat beberapa data penghasilan dan biaya yang belum dilaporkan ke dalam SPT-nya. PPh 29 yang telah disetorkan sebelum penyampaian SPT adalah Rp 550 juta, sedangkan nominal seharusnya adalah Rp 700 juta. Chandra kemudian menyampaikan SPT Pembetulan pada tanggal 16 September 2017.

Tim Pemeriksa Pajak mulai melakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan 2016 Chandra pada bulan Oktober 2017. Setelah proses pemeriksaan selesai, Pemeriksa kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada tanggal 5 Desember 2017. Menurut Pemeriksa, seharusnya pajak kurang bayar yang dibayarkan Chandra sebelum menyampaikan SPT-nya adalah Rp 900 juta. Chandra memberikan tanggapan atas ketidaksetujuannya untuk nominal pajak sebesar Rp 200 juta. Namun, Pemeriksa tetap tidak setuju dan kemudian menerbitkan SKPKB pada tanggal 24 Desember 2017. Oleh karena itu, Chandra membayarkan kekurangan pajaknya sebesar Rp 200 juta pada 5 Februari 2018.

#### Pertanyaan:

- a. Apakah ada sanksi pajak yang akan dikenakan kepada Chandra karena Chandra menyampaikan SPT Pembetulan? Berikan penjelasan (dan perhitungan sanksi, jika ada) disertai dengan dasar hukumnya! (6%)
- b. Apabila seandainya Chandra baru dapat menyampaikan kesalahan dalam SPT-nya pada tanggal 3 November 2017, apakah ada sanksi pajak yang akan dikenakan kepada Chandra atas tindakan yang dilakukan Chandra tersebut? Berikan penjelasan (dan perhitungan sanksi, jika ada) disertai dengan dasar hukumnya! (6%)
- c. Berapa besarnya sanksi pajak yang dikenakan kepada Chandra terkait kekurangan pajak dalam SKPKB tersebut? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (6%)
- d. Kapan Chandra harus membayarkan kekurangan pajak dalam SKPKB tersebut? Apakah ada sanksi pajak yang dikenakan kepada Chandra terkait dengan pembayaran SKPKB yang dilakukan tanggal 5 Februari 2018 di atas? Berikan penjelasan (dan perhitungan sanksi, jika ada) disertai dengan dasar hukumnya! (7%)

## SOAL 2

Aldo memiliki usaha percetakan, warung makan, dan rumah kost. Peredaran usaha perusahaan di atas 20 miliar setahun dari semua usaha yang dimiliki. Dari hasil usaha tersebut Aldo membeli beberapa properti untuk disewakan maupun dijual lagi. Aldo mendanai kegiatan usahanya dengan modal sendiri sehingga Aldo tidak merasa perlu untuk membuat pencatatan keuangan dan pembukuan. Pada tahun 2013, Pemda Depok menetapkan Aldo sebagai pengusaha restoran yang atas usahanya tersebut harus memungut pajak restoran. Karena tidak dapat menghindari dari kewajiban membayar pajak daerah dan kewajiban memiliki NPWP, mulai tahun 2013 Aldo memiliki NPWP dan mulai memenuhi kewajiban pajaknya.

Untuk memenuhi kewajiban pajak daerah, Aldo menyerahkan kepada konsultan pajak yang berafiliasi dengan petugas pajak Dispenda dan juga KPP. Pada tahun 2015, Aldo membayar jasa konsultan sebesar 10 juta dan pajak sebesar 30 juta. Aldo menyerahkan semua catatan penerimaan dan pengeluaran uang dari usahanya kepada konsultan pajak. Aldo memiliki lebih dari 10 karyawan dan lima diantaranya diberikan gaji di atas PTKP, namun tidak pernah dilakukan pemotongan pajak. Untuk menarik pelanggan, Aldo memasang iklan di depan usahanya, namun karena ukurannya tidak terlalu besar, maka Aldo tidak membayar pajak atas pemasangan iklan tersebut.

Aldo tidak paham masalah perpajakan, namun pada saat diminta tanda tangan SPT pajak, sebenarnya Aldo tahu bahwa nilai penjualan yang dicantumkan dalam SPT tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan omset penjualan yang terjadi. Demikian juga kekayaan yang dicantumkan dalam SPT pajak juga tidak menunjukkan seluruh kekayaan yang dimiliki. Aldo merasa aman pajaknya tidak bermasalah karena tidak pernah diperiksa. Aldo juga yakin dengan kemampuan konsultan pajaknya.

Tahun 2016 Aldo mendengar tentang tax amnesty dan mendiskusikan dengan konsultan pajaknya apakah perlu melakukan tax amnesty. Kembali Aldo disarankan mengikuti tax amnesty dan konsultannya menyarankan untuk melaporkan sebagian satu property dan deposito yang dimiliki. Aldo membayar uang tebusan *tax amnesty* dengan menggunakan dasar nilai NJOP property yang dimiliki dan nilai deposito. Namun, sebenarnya masih ada sepuluh tanah dan bangunan yang belum dilaporkan dalam tax amnesty tersebut.

### Diminta:

- a. Etiskah apa yang dilakukan Aldo menurut Anda?
- b. Berikan pendapat Anda tentang pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Aldo dan berikan referensi pasal dan potensi sanksi yang harus diterima atas pelanggaran tersebut!
- c. Apakah konsultan pajak yang menyelesaikan administrasi pajak Aldo dapat juga dikenakan sanksi?
- d. Jelaskan pandangan Anda tentang regulasi *tax amnesty* dengan melihat kasus seperti Aldo?
- e. Berikan saran apa yang seharusnya dilakukan oleh Aldo?

### SOAL 3

WP Badan PT. Anggrek Hitam menyelesaikan kewajiban pajak untuk tahun 2013 dengan membayar pajak pada 25 April 2014 dan melaporkan pajak pada 28 April 2014. SPT Pajaknya menyebutkan bahwa:

Penghasilan	100.000.000.000
Beban yang boleh dikurangkan	76.000.000.000
Penghasilan kena pajak	24.000.000.000
Pajak	<u>25%</u>
Pajak	6.000.000.000
PPh 25	<u>5.000.000.000</u>
PPh 29	1.000.000.000

PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp 500.000.000 per bulan mulai dibayar bulan Mei 2014.

Perusahaan pada 22 September 2014 mulai diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa beban yang boleh dikurangkan sebesar Rp 64.000.000.000, sedangkan untuk penghasilan dan kredit pajak jumlahnya sesuai SPT. WP tidak menyetujui temuan pemeriksa pajak tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dikeluarkan SKPKB pada tanggal 25 November 2014.

#### Diminta:

- Berapa nilai pajak dan denda yang ada dalam SKPKB pada tanggal 25 November 2014? (4)
- Kapan paling lambat perusahaan membayar pajak dalam SKPKB tersebut? Jelaskan bagaimana dampak pembayaran SKPKB terhadap pembayaran PPh 25 dan berapa denda pajak yang harus dibayar? (4)
- Jika perusahaan tidak membayar seluruh SKP tersebut dan mengajukan keberatan, kapan perusahaan paling lambat mengajukan keberatan dan apa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat mengajukan keberatan? (1)
- Misalnya perusahaan mengajukan keberatan pada tanggal 20 Januari 2015, kapan Surat Keputusan Keberatan paling lambat harus dikeluarkan oleh Kantor Pajak? (1)
- Surat Keputusan Keberatan dikeluarkan pada tanggal 25 September 2015 dan menyatakan bahwa jumlah beban yang boleh dikurangkan Rp 70.000.000.000. Perusahaan menerima keputusan keberatan tersebut. Berapa jumlah pajak dan denda yang harus dibayar berdasarkan keputusan keberatan tersebut? (5)
- Misal, perusahaan tidak menerima seluruhnya keberatan tersebut karena merasa yakin bahwa pendapatnya benar, kemudian mengajukan banding tanggal 5 Desember 2016. Hasil putusan banding dikeluarkan pada tanggal 6 September 2016 dan menyatakan bahwa beban yang boleh dikurangkan sebesar Rp 73.000.000.000. Hitunglah berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan beserta dendanya. (5)